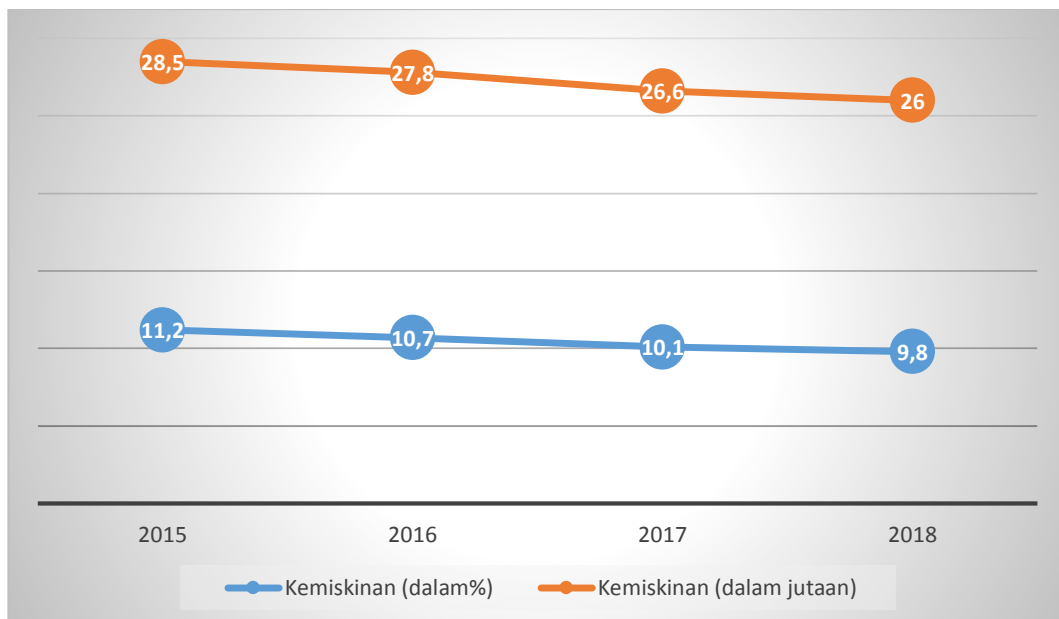


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan sebuah fenomena sosial yang sudah menjadi masalah pokok bagi Indonesia. Fenomena atau masalah ini sudah seperti mengakar dan menjadi sebuah masalah yang sangat sulit untuk diatasi di Indonesia, Menurut Amalia (2015 : 315) kemiskinan adalah kondisi dimana tidak terpenuhinya kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar sehingga standard hidup layak tidak tercapai. Kebutuhan dasar yang dimaksud seperti makanan, pakaian, rumah atau tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat berupa gambaran kekurangan dari sisi materi, kurangnya kebutuhan sosial, pendapatan, akses terhadap sumber-sumber tertentu, dan lainnya, selain itu kemiskinan merupakan akibat dari kesenjangan kepemilikan faktor produksi, kegagalan kepemilikan, kebijakan yang bias, perbedaan kualitas sumber daya manusia, serta rendahnya pembentukan modal masyarakat atau rendahnya rangsangan untuk penanaman modal. Berikut merupakan statistik kemiskinan yang terdapat di Indonesia 4 tahun terakhir:



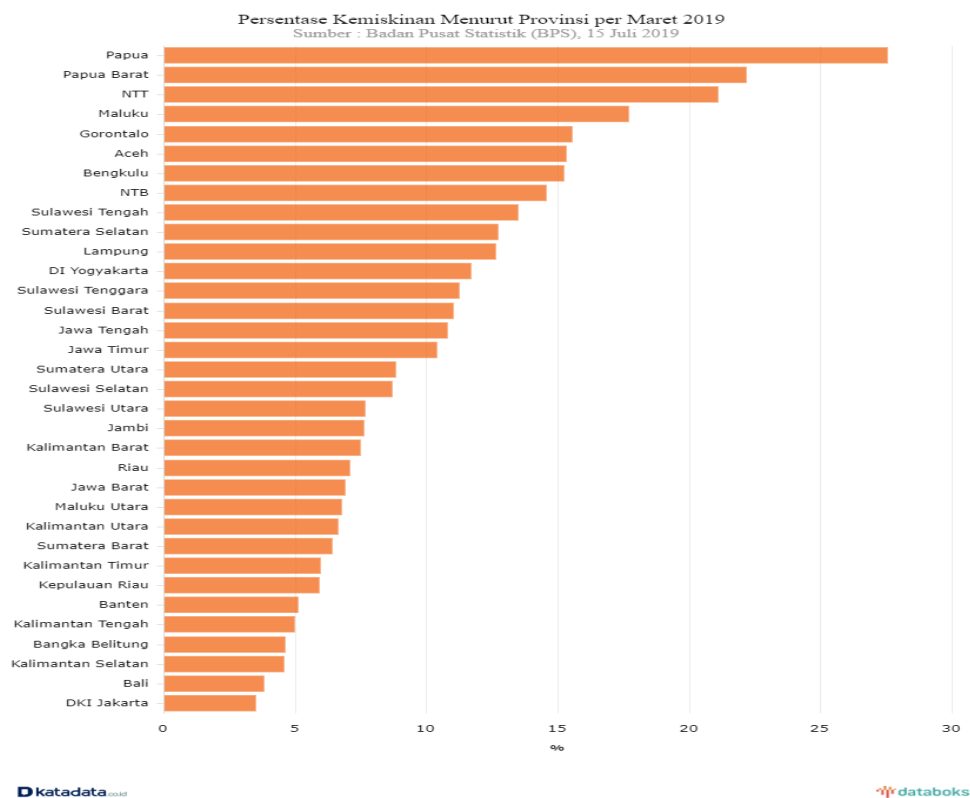
Gambar 1. 1 Grafik Kemiskinan di Indonesia Per 2015-2018

Sumber : Badan Pusat statistik (BPS), 2019

Dari tabel diatas dapat kita simpulkan adanya penurunan kemiskinan secara perlahan dan konsisten. Namun diluar itu pemerintah Indonesia tidak membuat secara ketat definisi kemiskinan sehingga terlihat sangat positif apabila dilihat dari tabel kemiskinan di atas, karena adanya penurunan kemiskinan secara konsisten namun tidak dengan kenyataanya. Pada tahun 2016 pemerintah Indonesia telah menetapkan bahwa definisi garis kemiskinan di Indonesia yaitu orang dengan pendapatan per bulannya sebanyak Rp. 354,386 atau sekitar \$25 apabila kurs dollar dihitung Rp. 14.000, yang mana apabila dihitung kembali pendapatan perbulan sebesar Rp. 354,386 perharinya berarti hanya berpenghasilan sekitar Rp. 11.500 jumlah yang sangat kecil untuk kebutuhan pokok yang dibutuhkan setiap keluarga untuk mencukupi kehidupan sehari-harinya. Dengan itu kita bisa melihat bahwa

definisi kemiskinan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sudah sangat jelas berstandart sangat rendah.

Selain di lingkup nasional, di lingkup daerah pun kemiskinan sudah menjadi permasalahan yang mengakar. Sejak dulu, daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi sebagian terdapat di Indonesia bagian timur. Dilansir dari databoks.co.id berikut merupakan grafik kemiskinan tingkat provinsi yang ada di Indonesia:

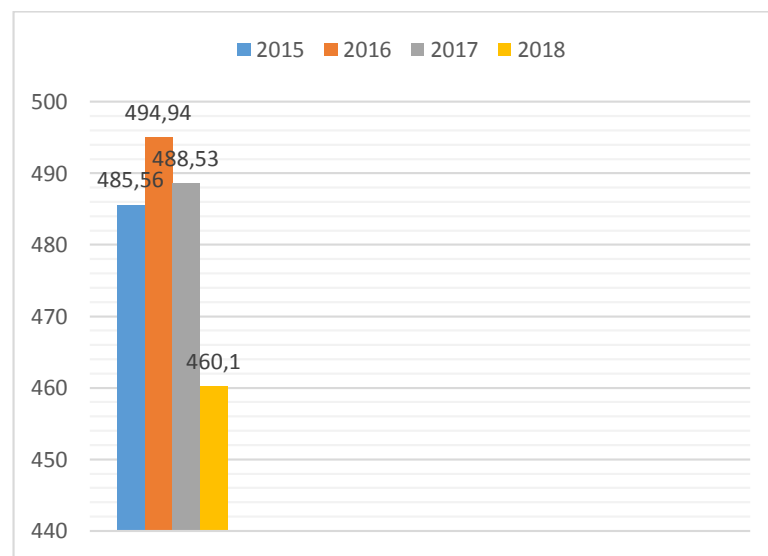


Gambar 1. 2 Grafik kemiskinan tingkat provinsi di Indonesia

Sumber : databoks.co.id, 2019

Dari data di atas bisa dilihat bahwa provinsi dengan tingkat kemiskinan paling tinggi terdapat di Papua dan yang paling rendah yaitu terdapat di DKI Jakarta. Sudah pasti kemiskinan sangat tinggi di daerah Papua dikarenakan banyak faktor yang mempengaruhinya seperti SDM yang kurang unggul maupun infrastruktur yang menjadi penghambat aktifitas perekonomian yang terdapat di daerah tersebut. Namun di pulau Jawa sendiri D.I Yogyakarta menjadi provinsi dengan angka presentase kemiskinan tertinggi di dalam grafik di atas dan DKI Jakarta yang terendah tentunya.

Berikut merupakan grafik kemiskinan yang terdapat di D.I Yogyakarta dari tahun 2015 hingga 2018:



Gambar 1. 3 Grafik kemiskinan D.I Yogyakarta

Sumber: BPS Yogyakarta, 2019

Dari gambar diatas per 2015-2018 angka kemiskinan di D.I Yogyakarta masih terlihat fluktuatif. Pada tahun 2015 terdapat 485,56 ribu orang miskin yang terdapat di D.I Yogyakarta kemudian naik 9,38 ribu pada tahun 2016 yang

berjumlah 494,94 ribu orang, kemudian turun pada tahun 2017 sebanyak 488,53 ribu orang dan kemudian turun lagi pada tahun 2018 di angka 460.1 ribu orang, bisa disimpulkan bahwa tingkat kemiskinan di Yogyakarta masih fluktuatif namun cenderung menurun pada tahun 2018.

Secara konseptual, kemiskinan bisa diakibatkan oleh beberapa faktor yaitu pertama faktor individual terkait dengan aspek patologis termasuk kondisi fisik dan psikologis si miskin, orang miskin disebabkan oleh perilaku, pilihan atau kemampuan dari si miskin itu sendiri dalam menghadapi kehidupannya, kedua yaitu faktor sosial seperti kondisi-kondisi lingkungan sosial yang menjebak seseorang menjadi miskin, misalnya diskriminasi berdasarkan usia, gender, etnis yang menyebabkan seseorang menjadi miskin dan termasuk dalam faktor ini adalah kondisi sosial dan ekonomi keluarga si miskin yang biasanya menyebabkan kemiskinan antar generasi, dan yang terakhir yaitu faktor kultural.

Menurut Soekanto dalam Amalia (2015 : 314) Kemiskinan juga diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Menurut sejarah, keadaan kaya dan miskin secara berdampingan tidak merupakan masalah sosial sampai saatnya perdagangan berkembang dengan pesat dan timbulnya nilai-nilai sosial yang baru. Berkembangnya perdagangan ke seluruh dunia dan ditetapkannya taraf kehidupan tertentu sebagai suatu kebiasaan masyarakat, kemiskinan muncul sebagai masalah sosial. Pada waktu itu individu sadar akan kedudukan ekonominya sehingga mereka mampu untuk mengatakan apakah dirinya kaya atau miskin.

Kemiskinan dianggap sebagai masalah sosial apabila perbedaan kedudukan ekonomis para warga masyarakat ditentukan secara tegas.

Dalam arti *proper* kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Dalam arti luas, kemiskinan merupakan suatu fenomena *multi face* atau *multidimensional*. Menurut Chambers dalam Nasikun (2001) mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu *integrated concept* yang memiliki lima dimensi, yaitu kemiskinan (*proper*), ketidakberdayaan (*powerless*), kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*), ketergantungan (*dependence*), dan keterasingan (*isolation*) baik secara geografis maupun sosiologis.

Al-Qur'an memakai beberapa kata dalam menggambarkan kemiskinan, yaitu faqir, miskin, al-sail, dan almahrum, tetapi dua kata yang pertama paling banyak disebutkan dalam ayat al-Qur'an. Kata fakir dijumpa dalam al-Qur'an sebanyak 12 kali dan kata miskin disebut sebanyak 25 kali, Tentang dua golongan yang pertama, yaitu fakir dan miskin para ahli berbeda pendapat, ada yang mengemukakan bahwa dua golongan tersebut pada hakikatnya adalah sama. Demikian pendapat Abu Yusuf, pengikut Imam Abu Hanifah, dan Ibnu Qasim pengikut Imam Malik. Berbeda dengan pendapat sebagian besar ulama, sebenarnya keduanya adalah dua golongan tetapi satu macam, yakni dalam hal kondisi kekurangan dan dalam kebutuhan. Para ahli tafsir dan ahli fikih juga berbeda pendapat dalam memberi definisi kedua kata tersebut. Yusuf al-Qardhawi memberikan perumpamaan bahwa kedua kata tersebut seperti Islam dan Iman, jika dikumpulkan terpisah, yakni masing-masing mempunyai arti tersendiri, dan jika

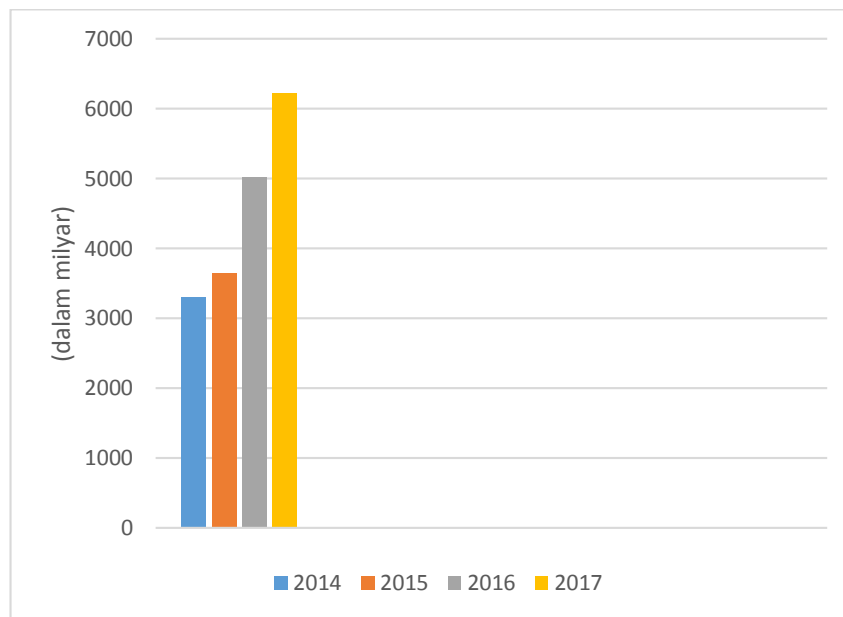
dipisah terkumpul, yakni bila salah satu disebutkan sendiri-sendiri, masing-masing mempunyai arti buat kata lain yang sejajar. (Budiharjo, 2007: 15)

Sedangkan apabila kita berbicara tentang SDGs (*Sustainable Development Goals*) sendiri terdapat 17 tujuan dari SDGs itu sendiri dan salah satunya yaitu *No Poverty* yaitu pengentasan segala bentuk kemiskinan di semua tempat. Dengan adanya fokus dari beberapa tujuan dari SDGs ini yaitu *No Poverty* (Tanpa Kemiskinan), *Zero Hunger* (Tanpa Kelaparan), *Good Health and Well-Being* (Kehidupan sehat dan Sejahtera), dan *Quality Education* (Pendidikan Berkualitas) tentu saja selaras dengan tujuan pengentasan kemiskinan di dalam Islam, Kontribusi sosial dengan tujuan meredakan atau menanggulangi permasalahan kemiskinan seperti ini merupakan suatu hal yang sangat berperan penting untuk membantu mengurangi kesenjangan sosial yang terdapat di masyarakat. Di dalam Islam tentu saja terdapat dana ZIS yang memiliki potensi untuk menjadi dana yang lebih bermanfaat dan bisa menjadi solusi bagi permasalahan kemiskinan sesuai dengan salah satu tujuan dari SDGs tersebut. Tentu saja dapat disimpulkan bahwa adanya keselarasan tujuan dan proses untuk menanggulangi kemiskinan antara syariat Islam dan tujuan dari SDGs itu sendiri.

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas bearagama muslim yang dimana didalam agama Islam terdapat instrumen penting yang bergerak dalam kegiatan sosial yaitu Zakat, Infaq, Sedekah yang biasa disingkat ZIS yang diharapkan bisa mengentaskan dan mengatasi fenomena permasalahan yang terjadi di Indonesia yaitu kemiskinan. Hukum Islam memandang harta memiliki nilai yang sangat strategis, karena harta merupakan alat dan sarana untuk memperoleh

berbagai manfaat untuk mencapai kesejahteraan hidup manusia sepanjang waktu. Zakat adalah suatu kewajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkan dalam Al-Quran, Sunnah Nabi, dan ijma' ulama. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang selalu disebutkan sejajar dengan salat. Inilah yang menunjukkan betapa pentingnya zakat sebagai salah satu rukun Islam. Bagi mereka yang mengingkari kewajiban zakat maka telah kafir, begitu juga mereka yang melarang adanya zakat secara paksa (Al ba'ly, 2006: 1-2)

Ditinjau dari sumber dana dalam filantropi terdapat dana Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS), dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia seharusnya Indonesia berpotensi besar dalam penghimpunan yang besar dalam mendapatkan dana ZIS yang besar. Dilansir dari dompetdhuafa.org bahwa potensi zakat di Indonesia bisa mencapai Rp. 217 Triliun, namun sayangnya potensi besar tersebut belum bisa teroptimalkan dengan keadaan lapangan yang hanya menyerap dana 1% dari jumlah potensi dana zakat tersebut, namun dari potensi tersebut belum termasuk dengan dana wakaf infaq maupun sedekah yang lebih bersifat sukarela. Dilansir dari pid.baznas.go.id berikut merupakan data perkembangan zakat pada tahun 2014 hingga tahun 2017 :



Gambar 1. 4 Grafik perkembangan ZIS Indonesia

Sumber: pid.baznas.go.id, 2019

Dari data di atas bisa dilihat bahwa perkembangan zakat selalu meningkat setiap tahunnya, pada tahun 2014 tercatat penghimpunannya mencapai 3.300 milyar rupiah kemudian mengalami sedikit kenaikan pada tahun 2015 yaitu 3.650 milyar rupiah, kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2016 mencapai 5.020 milyar rupiah kemudian meningkat lagi pada tahun 2017 yaitu 6.225.

Dengan demikian ZIS bisa menjadi salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan sosial yang sudah lama mengakar di Indonesia yaitu kemiskinan, dengan potensi dana ZIS besar ini dibutuhkan pengkordiniran sistem-sistem yang tertata dan kuat agar potensi besar ini bisa dioptimalkan dengan maksimal untuk mengentaskan kemiskinan dan untuk mensejahterakan masyarakat. Apabila semakin tinggi dana dari ZIS yang terhimpun maka semakin tinggi pula pendapatan dana dari para *mustahiq* dengan tingginya pendapatan *mustahiq* jika diolah dengan

baik, maka diharapkan dapat mengatasi permasalahan sosial yaitu kemiskinan di Indonesia.

Tak terlepas dari ulasan diatas perkembangan dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia semakin bermunculan dan berkembang, Salah satunya yaitu lembaga keuangan Islam non-bank yaitu Baitul Maal wat Tamwil (BMT). BMT merupakan sebuah lembaga yang bergerak pada bidang komersial dan sosial. Sebagai sebuah lembaga yang memiliki dwifungsi yaitu lembaga profit dan non profit, seharusnya dari pihak BMT juga harus seimbang dalam penyusunan strategi antara pengambilan profit dan strategi dalam menyalurkan dana sosialnya untuk membantu masyarakat miskin dan mencapai tujuan Sustainable Development Goal's. Sebagaimana kita ketahui bahwa Baitul Maal lebih banyak diaplikasikan untuk kegiatan sosial melalui penghimpunan dana yang bersumber dari zakat, infaq, shodaqoh, wakaf dan lainnya dengan orientasi pada kaum anak yatim dan dhuafa.

Pada BMT Bina Ikhsanul Fikri Yogyakarta memiliki bagian maal yang dinamai dengan Baitul Maal Indonesia. Baitul Maal Indonesia ini sendiri pada tahun 2017 sudah membangun pondok yatim Al-Amin yang dari pembangunan gedung dan tanah sudah menghabiskan dana sebesar 1,8 M dan dana tersebut diambil dari dana yang dihimpun oleh Baitul Maal Indonesia. Santri yang ada di panti tidak dipungut biaya, semua biaya operasional, makan dan fasilitas tempat tinggal sudah di tanggung oleh pihak Baitul Maal Indonesia. Dana yang dihabiskan untuk keperluan santri seperti makan, uang saku dan biaya operasional lainnya mencapai 15 juta perbulannya yang diambil langsung dari dana ZIS yang terkumpul. Selain itu pihak pondok yatim Al-Amin sendiri juga memiliki sebuah

usaha yaitu usaha air mineral kemasan. Santri di pondok Al-Amin juga sudah dijamin kesehatannya dikarenakan pihak Baitul Maal Indonesia juga sudah memfasilitasi dokter yang berkerja sama langsung dengan UGM sehingga kesehatan dari para santri di cek setiap bulannya.

Dari penjelasan mengenai penyaluran dana baitul maal Indonesia yang terfokus pada pondok panti asuhan Al-amin tersebut selaras juga dengan 5 tujuan SDGs yaitu *No Poverty* (Tanpa Kemiskinan) dimana santri yatim disana memang diambil dari anak yang kurang mampu dan juga disana ikut membantu usaha air mineral yang dijalankan oleh panti asuhan Al-Amin, *Zero Hunger* (Tanpa Kelaparan) tidak dipungut biayanya anak-anak dalam biaya operasionalnya, terjaminnya kesehatan bagi anak-anak pondok *Good Health and Well-Being* (Kehidupan sehat dan Sejahtera) dan *Quality Education* (Pendidikan Berkualitas) Maka peneliti mengambil judul ***“Peran Baitul Maal dalam Penyaluran Dana Sosial untuk Mencapai Tujuan Sustainable Development Goal’s (Studi Kasus BMI pada Baitul Maal Wa Tanwil (BMT) Bina Ikhsanul Fikri Yogyakarta)”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Baitul Maal pada BMT BIF dalam penyaluran dana sosial untuk masyarakat miskin?
2. Bagaimana pencapaian SDGs oleh Baitul Maal pada BMT Bina Ikhsanul Fikri?

C. Tujuan

Sesuai dengan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Baitul Maal dalam penyaluran dana sosial pada BMT Bina Ikhsanul Fikri.
2. Untuk mengetahui sejauh mana pencapaian SDGs oleh BMT Bina Ikhsanul Fikri.

D. Manfaat

Melalui penelitian ini, maka diharapkan akan memperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap teori-teori, metode dan peran dalam kajian ilmu sosial ekonomi terkait Zakat Infak Sedekah dan Wakaf.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang masalah yang diteliti, selain itu sebagai wujud nyata penerapan teori-teori yang diterima dibangku kuliah, serta dapat membandingkan antara teori dan praktek yang akan terjadi di lapangan.

- b) Bagi Instansi Terkait

Merupakan suatu informasi dan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang akan diambil, khususnya kebijakan yang berhubungan dengan peran distribusi ZIS yang dikelola oleh BMT Bina

Ikhsanul Fikri Yogyakarta terhadap pengetasan kemiskinan di Kota Yogyakarta.